

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹ Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi keluar dan kedalam.²

Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu:

¹ Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945.

² <http://www.google.com>, Pendidikan Kewarganegaraan X, Arif Pramono Achmadi, Sabtu, 3 November 2012, pukul 19.00 WIB.

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Amanat UUD 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemasyarakatan.

Perlulah diingat bahwasannya penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjaraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan.³

Tujuan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab.

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Fungsi Pembinaan adalah menjadikan warga binaan menyatu (*integral*) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggung jawab. Adapun maksud dari manusia seutuhnya adalah narapidana sebagai individu yang diarahkan fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Sedangkan definisi terintegrasi secara sehat dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁴

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kualitas makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara fisik dan perkembangan mental narapidana di LP. Di dalam kesehariannya, narapidana menjalankan pembinaan dari pihak LP, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terkena serangan penyakit, kurang motivasi dan apatis.

Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban LP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas para narapidana. Meskipun status mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan dimana sebagian hak-haknya dirampas oleh negara tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang layak.

⁴ Lukman Bratamidjaja, 2009, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.1.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dan juga dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

Pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mempunyai tujuan khusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa, menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok LP dibidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian Warga Binaan Pemasyarakatan akan menurun dan derajat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian maka secara yuridis formal hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama di LP sudah dijamin oleh hukum sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Sehingga hak-hak narapidana terpenuhi,

semangat dan cita-cita penegakan prinsip-prinsip HAM serta pembenahan di LP akan tercapai sebagaimana mestinya. Sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di dalam LP, khususnya di LP Klas IIA Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta sudah optimal?
2. Apa faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta apakah sudah optimal.
2. Mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di LP Klas IIA Yogyakarta. Lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. LP, khususnya LP Klas IIA Yogyakarta agar dapat memberikan hak-hak bagi narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak.
- b. Pembina LP, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak, dalam hal ini termasuk hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa LP adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang

diakomodasi oleh LP, termasuk hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.

- d. Perumus perundang-undangan (*legal drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.
- e. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai LP, bahwa LP merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.
- f. Penulis, agar dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, dan karena itu kita juga sebaliknya memperlakukan mereka sebagai manusia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum/Skripsi ini dengan judul “Optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa yaitu :

1. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul *“Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah hak-hak narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas LP di LP Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti mengenai hak-hak narapidana tersebut.
2. Alfind Lamber Far-far, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul *“realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Wirogunan”*. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan LP Kelas IIA Wirogunan serta tujuan penelitian adalah Mengetahui dan memperoleh data mengenai arti penting realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di LP Kelas IIA Wirogunan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama menjalani masa pembinaan di LP Kelas IIA Wirogunan relatif cukup baik, dengan menggunakan tolak ukur yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Nomor: W22.Ea-01. DL.03.02 Tahun 2007 tentang

Premi dan atau Upah Karya narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2007. Dikatakan demikian karena dalam aturan tersebut narapidana wajib untuk menerima upah dan atau premi setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan, namun dalam realisasinya pemberian premi tidak dilakukan setiap bulan, tetapi pemberian premi itu dilakukan ketika hasil produksi laku terjual dan menghasilkan keuntungan.

3. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul *“Implementasi Hak Napi untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui implementasi hak napi untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah belum semua hak napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, dalam hal ini khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hasilnya mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut antara lain : Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat yang cenderung masih apriori.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami mengenai dukungan terhadap proses pembinaan narapidana dalam masyarakat, juga menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan penerapan konsep masyarakat itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada proses optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama di LP termasuk kendala ataupun faktor-faktor penyimpangan yang terjadi dalam proses tersebut.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta.

1. Optimalisasi:

Yang dimaksud dengan optimalisasi adalah pengoptimalan, proses membuat sesuatu menjadi optimal (terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan).⁵ Dalam matematika dan ilmu komputer, optimasi atau optimalisasi mengacu pada pilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang tersedia. Dalam kasus yang paling sederhana, ini berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang-orang berusaha untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan memilih nilai-nilai variabel integer atau real dalam set yang diperbolehkan.⁶

⁵ Donald A. Rumokoy, 2010, *Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 566.

⁶ <http://oktavita.com/pengertian-optimalisasi.htm>, Rabu, 21 November 2012, pukul 20.00 WIB.

2. Hak:

Yang dimaksud dengan hak menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁷ Menurut KBBI adalah milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

3. Napi:

Yang dimaksud dengan napi (nara pidana) menurut KBBI adalah orang hukuman (orang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.⁹ Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.

4. Hak Napi:

Yang dimaksud dengan hak napi adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.

5. Makanan:

Yang dimaksud dengan makanan menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dimakan seperti panganan, lauk pauk, kue atau segala bahan yang kita makan yang masuk kedalam tubuh untuk membentuk atau

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

⁸ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 381.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 774.

mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh.¹⁰

6. Layak:

Yang dimaksud dengan layak menurut KBBI adalah wajar, pantas dan patut.¹¹

7. Makanan Yang Layak:

Yang dimaksud dengan makanan yang layak adalah makanan yang memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :

- a. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.
- b. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
- c. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
- d. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan.¹²

8. LP:

Yang dimaksud dengan LP menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana, penjara.¹³ Menurut Undang-undang

¹⁰ *Ibid.* hlm. 125.

¹¹ *Ibid.* hlm. 130.

¹² <http://prayitno-com.blogspot.com/2011/07/sanitasi-makanan.html>, Rabu, 21 November 2012, pukul 20.30 WIB.

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian tentang optimalisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung.¹⁴ Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer, meliputi:

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah LP Klas IIA Yogyakarta, yang terletak di JL. Taman Siswa Nomor 06 Yogyakarta 5511, Telp. 0274-375802. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 655.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta, hlm. 52.

dan pertimbangan bahwa LP Klas IIA Yogyakarta telah menampung banyak narapidana baik yang lama maupun yang baru dengan demikian tidak tertutup kemungkinan biaya operasional semakin bertambah sehingga dapat menyebabkan kurang optimalnya realisasi pemberian makanan terhadap narapidana di LP tersebut, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni menyangkut hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama berada di LP.

2) Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang menjadi pengamatan peneliti.¹⁵ Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan penulis untuk meneliti seluruhnya, maka penulis menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.¹⁶ Dalam penelitian ini sampel populasi yang diambil terdiri dari narapidana yang menurut

¹⁵ Bambang Sugono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, hlm. 51.

penulis mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh populasi itu, antara lain beberapa narapidana yang sedang menjalani hukumannya di LP Klas IIA Yogyakarta.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Yogyakarta. Adapun nama-nama dari responden antara lain: Sapto Priyo Atmojo, Janikey Manurung, Susanti Durhayanti, Hadi Bramitno, Agus Suparmana, Rita Supriati, Wawan Ardiyarta, Edi Setiawan, Lulu Harul Arifin, Jumadi, Ana Pujiastuti, Sumiyati, Andri Susilo, Hartuti, Jamli Cahyo.

4) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas LP Klas IIA Yogyakarta, yaitu: Ibu Hastiti, selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) yang khusus mengurus dapur dalam hal penyelenggaraan makanan di LP.

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28I ayat (5).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) huruf d, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 19 ayat (1).
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bagi narasumber dan responden di LP Klas IIA Yogyakarta.

b. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuesioner serta hasil penelitian kepustakaan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan LP secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul **“Optimalisasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Yogyakarta”** ini terbagi dalam tiga bagian besar.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana, Implementasi Pemberian Makanan di LP KLAS IIA YOGYAKARTA, serta Faktor Penghambatnya.

Bab ini membahas tentang :

- A. Konsep HAM di Indonesia yang meliputi: Pengertian tentang HAM, Instrumen Peraturan Mengenai HAM, Konsep HAM di Indonesia.
- B. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana yang meliputi: Pengertian Hak Narapidana, dan dibahas secara khusus Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak.
- C. Implementasi Pemberian Makanan terhadap Narapidana di LP Klas IIA Yogyakarta serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian makanan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

